



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOHNI SONDER**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **135917**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp.

710.000.000

1. Tanah Seluas 496 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
2. Tanah Seluas 1249 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 725 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALANGKA RAYA , WARISAN Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 960 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
WARISAN Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 1178 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. Tanah Seluas 565 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI
Rp. 20.000.000
7. Tanah Seluas 1402 m2 di KAB / KOTA KAPUAS, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 3420 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
10. Tanah Seluas 1200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

165.000.000



1. MOBIL, TOYOTA SIENTA G Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 138.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 61.386.050

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.074.986.050

III. HUTANG Rp. 95.600.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 979.386.050

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.